

**MEKANISME REKRUTMEN ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA
LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK
(STUDI TERHADAP PDIP, PARTAI GERINDRA DAN PARTAI
PERINDO DI KOTA YOGYAKARTA PADA PEMILU 2019)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

KHOLIL HASYIM NUR MAHMUD
15340093

PEMBIMBING:
NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai bunyi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diwujudkan dengan dibentuknya partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik di Indonesia. Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dengan memegang peranan penting untuk mencetak calon pemimpin bangsa, baik atau tidaknya pemimpin tergantung dari kualitas partai politik dalam melakukan rekrutmennya. Salah satu fungsi partai politik yang penting bagi kelangsungan partai politik yaitu melalui rekrutmen politik. Tentunya dalam melakukan rekrutmen, partai politik harus melakukan rekrutmen dengan selektif agar nantinya siapa yang akan masuk dalam kandidasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan masing-masing partai politik.

Jenis penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan fungsionaris partai politik di Kota Yogyakarta seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa pihak terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mana melihat kesesuaian dari data-data di lapangan yang merupakan data primer dengan bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan. Partai politik yang menjadi sampel adalah PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang coba memaparkan mekanisme rekrutmen oleh partai politik di Kota Yogyakarta dengan meneliti data-data yang telah terkumpul.

Hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rekrutmen oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta mencakup rekrutmen anggota dan rekrutmen calon anggota legislatif. Pada rekrutmen anggota cenderung memiliki persamaan, dimana syarat dan prosedur rekrutmen dapat diketahui secara luas, sehingga bisa dikatakan menggunakan mekanisme rekrutmen terbuka dengan indikator calon anggota yang direkrut telah cukup umur dan memiliki KTP. Sedangkan rekrutmen calon anggota legislatif menunjukkan adanya perbedaan. PDIP misalnya, menggunakan mekanisme rekrutmen tertutup, dimana syarat dan prosedur rekrutmen tidak dapat secara bebas diketahui umum dengan indikator yakni loyalitas dan ketokohan di masyarakat dari calegnya. Untuk Partai Gerindra cenderung menggunakan mekanisme rekrutmen terbuka dengan indikator calegnya memiliki kapabilitas untuk direkrut, bahkan dari Partai Gerindra sendiri mampu mengakomodir caleg penyandang disabilitas di Pemilu 2019 ini. Terakhir yakni Partai Perindo menggunakan mekanisme rekrutmen yang lebih terbuka, dengan indikator program politik partai dan mengedepankan citra sebagai partai politik pendatang baru.

Kata Kunci: Partai Politik, Rekrutmen, Mekanisme dan Indikator



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kholil Hasyim Nur Mahmud

Nim : 15340093

Judul : "Mekanisme Rekrutmen Anggota dan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik (Studi Terhadap PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunculkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-389/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME REKRUTMEN ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK (STUDI TERHADAP PDIP, PARTAI GERINDRA DAN PARTAI PERINDO DI KOTA YOGYAKARTA PADA PEMILU TAHUN 2019)

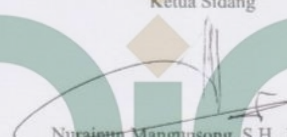
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOLIL HASYIM NUR MAHMUD
Nomor Induk Mahasiswa : 15340093
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

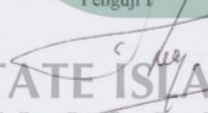
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

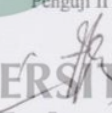
Ketua Sidang


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Penguji II


Dr. Hj. Siti Fatmahan, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-06/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholil Hasyim Nur Mahmud

NIM : 15340093

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Mekanisme Rekrutmen Anggota dan Calon Legislatif oleh Partai Politik (Studi Terhadap PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019)"** adalah benar-benar hasil karya saya pribadi dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Juli 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yang menyatakan,

Kholil Hasyim Nur Mahmud
NIM: 15340093

MOTTO

*“Ilmu yang kita miliki semoga merendahkan hati, bukan
dijadikan alat untuk menyombongkan diri.”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Teriring rasa syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan akal budi
untuk berfikir, serta shalawat atas Nabi Muhammad SAW.*

*Kupersembahkan karya ini kepada Ayah Bundaku yang telah
memberikan doa dan dukungan.*

*Para Dosen yang telah mengajar, mendidik dan membimbing
penyusun.*

Sahabat-sahabat seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2015.

*Serta almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Teriring sholawat serta salam yang selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita sebagai umatnya dari zaman jahiliyyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini, yang menjadi suri tauladan, dan yang membawa Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*.

Segala upaya penyusunan skripsi yang berjudul “Mekanisme Rekrutmen Anggota dan Calon Legislatif oleh Partai Politik (Studi Terhadap PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019)” telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna, akan tetapi penyusun menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki. Maka akan dijumpai kekurangan, baik dalam segi penulisannya maupun substansinya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun sangat berterima kasih jika terdapat kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Dengan keterbatasan yang penyusun miliki, oleh karenanya penyusun sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini perkenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penyusun.

6. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku penguji I skripsi yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya, serta bimbingan dan saran yang diberikan kepada penyusun dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku penguji II skripsi yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya, serta bimbingan dan saran yang diberikan kepada penyusun dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat.
9. Seluruh Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Bapak Raden Sunarya yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak Sutaryo, selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Yogyakarta yang telah memberikan banyak informasi sekaligus ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Made Dwi Putra, selaku Kepala Kantor Kesekretariatan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Yogyakarta yang telah memberikan banyak informasi sekaligus ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Ririk Banowati Permanasari, selaku Bendahara Umum Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Yogyakarta yang telah

memberikan banyak informasi sekaligus ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.

13. Bapak Eko Noprianto, selaku Kepala Kantor Kesekretariatan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Yogyakarta yang telah memberikan banyak informasi sekaligus ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
14. Bapak Wigit Adi Sasoko, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Yogyakarta yang telah memberikan banyak informasi sekaligus ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
15. Bapak Doni Bondan Wicaksono, selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Yogyakarta yang telah memberikan banyak informasi sekaligus ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
16. Ayahanda tercinta H. Mahmudin dan Ibunda tersayang Hj. Wartini yang selalu penyusun banggakan, sebagai contoh penyusun dalam menjalani kehidupan dan tiada henti untuk selalu mendoakan, memberikan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, serta memberikan kepercayaan, semangat dan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

17. Kakak dan adikku tercinta, Kholidah Hasyim Nur Mahmud dan Abdurrohman Al-Khusaini yang selalu memberi semangat dan dorongan motivasi kepada penyusun.
18. Sahabat seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015, yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan ilmu, serta dukungan moril motivasi.
19. Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya angkatan "ISHOMA LXIX" dan juga Pengawas, Pengurus, Staf serta seluruh anggota yang pula telah menjadi keluarga dan menambah pengalaman organisasi.
20. LP2KIS Yogyakarta yang telah menjadi guru, rekan diskusi, rekan berproses, serta keluarga dalam mengarungi luasnya samudra keilmuan khususnya dunia trainer, serta menambah pengalaman keorganisasian.
21. Sahabat seperjuangan KKN angkatan 96 kelompok 38 beserta warga Padukuhan Sangon II, Kalirejo, Kokap, Kulon Progo yang telah menjadi keluarga dan selalu memberikan semangat dan dorongan moril kepada penyusun.
22. BLKPP DIY atas kesempatan yang diberikan kepada penyusun untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam pelatihan kerja, khususnya rekan-rekan Food & Beverage Product II APBD 2019 yang selama ini bersama-sama untuk selalu berbagi pengetahuan dan keceriaan serta

menjadi keluarga baru yang saling memberikan dukungan satu sama lain. *So happy to be a part of us!*

23. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran.

Penyusun berharap semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam perkembangan partai politik.

Yogyakarta, 15 Mei 2019



Kholil Hasyim Nur Mahmud
NIM: 15340093



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK, DAN REKRUTMEN POLITIK	30
A. Tinjauan Demokrasi.....	30
1. Pengertian Demokrasi	30
2. Demokrasi Di Indonesia.....	36
B. Tinjauan Partai Politik.....	41

1. Pengertian Partai Politik.....	41
2. Pembentukan Partai Politik.....	43
3. Tujuan dan Fungsi Partai Politik.....	46
4. Hak dan Kewajiban Partai Politik.....	50
C. Tinjauan Rekrutmen Politik	51
1. Pengertian Rekrutmen Politik	51
2. Mekanisme Rekrutmen Politik.....	53
3. Model Rekrutmen Politik.....	54
4. Tahapan Rekrutmen Politik.....	56
5. Fungsi Rekrutmen Politik	56

BAB III GAMBARAN UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 SERTA REKRUTMEN ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK DI KOTA YOGYAKARTA..... 59

A. Deskripsi Partai Politik Peserta Pemilu 2019	59
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).....	59
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).....	66
3. Partai Persatuan Indonesia (Perindo).....	70
B. Pelaksanaan Rekrutmen oleh Partai Politik di Kota Yogyakarta 73	
1. Rekrutmen Anggota	74
2. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif	90
3. Perbandingan Pelaksanaan Rekrutmen oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta	109

BAB IV	ANALISIS REKRUTMEN ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK DI KOTA YOGYAKARTA.....	112
A.	Analisis Mekanisme Rekrutmen oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo	112
B.	Indikator Rekrutmen oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo	122
BAB V	PENUTUP.....	127
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran.....	129
	DAFTAR PUSTAKA.....	131
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada Pemilihan Umum 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	95
Tabel 2. Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terpilih pada Pemilihan Umum 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	97
Tabel 3. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada Pemilihan Umum 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	102
Tabel 4. Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terpilih pada Pemilihan Umum 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	104
Tabel 5. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada Pemilihan Umum 2019 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	108
Tabel 6. Perbandingan Rekrutmen oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta	110

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat¹ sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab, tak terelakkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal adanya partai politik sebagai suatu komponen dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi sebagai sebuah sistem yang diakui bersama. Kehadiran partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat

¹ Lihat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia.²

Gagasan mengenai partisipasi rakyat dalam negara demokrasi mempunyai dasar ideologis, bahwa dalam proses pemberian suara, rakyat menjalankan hak dan kewajiban mereka untuk memilih siapa yang layak memerintah mereka dan menentukan wakil-wakil mereka yang nantinya akan menentukan kebijakan umum. Selain itu, sebagai suatu negara demokrasi, Indonesia harus mengakui dan menghormati adanya Hak Asasi Manusia (HAM), artinya Indonesia harus mengakui hak-hak warga negara, antara lain hak untuk berkumpul, mendirikan perserikatan, menyatakan pendapat dan pemikirannya. Perkumpulan dan perserikatan dapat dilihat dari adanya organisasi kemasyarakatan, serikat kerja, LSM dan partai politik.

Dewasa ini istilah politik dan partai politik sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.³ Sedangkan partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

² Lihat Alenia Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 15.

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik harus mempunyai landasan hukum yang pasti. Partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Keberadaan partai politik tidak terlepas dari fungsi yang menjadi tanggungjawab partai politik untuk menjalankannya. Dalam negara demokrasi modern, fungsi partai politik secara umum yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.⁴

Salah satu fungsi partai politik yang berkaitan dengan sistem demokrasi adalah seleksi pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang disebut rekrutmen politik. Dalam hal ini Fadillah Putra mengemukakan bahwa rekrutmen politik didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif, rekrutmen politik ini berlangsung dalam satu tatanan politik yang jelas.⁵ Rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik itu sendiri, dalam artian perekrutan terhadap anggota dan kader partai, serta dengan seleksi dan kaderisasi berguna untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang

⁴ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 18-19.

⁵ Fadillah Putra, *Partai Politik & Kebijakan Publik*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 256.

berkualitas. Jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik, fungsi ini menjadi eksklusif bagi partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik.⁶

Berkaitan dengan rekrutmen politik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Semakin besar andil partai politik untuk memenangkan perjuangan dalam pengisian jabatan politik, merupakan indikator bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

Sumber daya yang paling utama dalam berpolitik adalah sumber daya manusia, karena partai politik tidak digerakkan oleh mesin dan teknologi, tetapi oleh manusia. Dengan demikian, cara organisasi partai politik dalam mendapatkan manusia yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi merupakan tantangan utama dalam hal manajemen organisasi partai politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen, tentunya orang yang memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga akan terjadi untuk memperebutkan orang-orang berpotensi yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.

⁶ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), hlm. 89.

Beberapa tahun terakhir tidak bisa dipungkiri bahwa popularitas selebriti sangat membantu partai politik untuk mendapat jatah kursi di parlemen. Hal tersebut membuktikan ada beberapa selebriti yang duduk di parlemen maupun pemerintahan melonjak angka peningkatannya dari periode ke periode. Sedikitnya 54 selebriti mendaftarkan diri menjadi calon legislatif di Pemilu 2019. Dari sekian banyak ada selebriti yang telah duduk di kursi parlemen, ada juga yang baru mencoba peruntungan menyalurkan aspirasi rakyat. Keinginan partai politik untuk mendapatkan jatah kursi di parlemen inilah yang membuat mereka melakukan berbagai cara untuk melakukan rekrutmen terhadap selebriti demi mendongkrak kemenangan di Pemilu. Namun partai politik seharusnya perlu memperhatikan rekam jejak kandidat serta kualitas yang dimiliki, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai wakil rakyat nantinya. Untuk ke depannya sebuah partai politik harus lebih selektif lagi bila ingin menggandeng kalangan selebriti, janganlah mengutamakan popularitas saja tanpa mengedepankan kualitas. Walaupun kelebihan merekrut selebriti akan mendongkrak suara dengan popularitas mereka di masyarakat, tidak memerlukan biaya tinggi lagi karena telah terdongkrak oleh kepopuleran selebriti tersebut.⁷

Hal lain dalam proses rekrutmen politik yakni tidak dibangunnya relasi yang baik antara partai politik dan masyarakat. Masyarakat hanya dipandang sebelah mata, bukan sebagai konstituen yang harus dihormati dan diperjuangkan. Maka akan timbul citra di masyarakat bahwa partai politik bukan sebagai bagian dari

⁷ <https://www.tagar.id/caleg-artis-senjata-partai-untuk-promosi-instan>, akses 24 Januari 2019.

gerakan sosial untuk mempengaruhi kebijakan dan mengontrol negara, melainkan hanya sebagai “kendaraan politik” untuk meraih kekuasaan dan kekuasaan. Tidak heran kalau kemudian partai politik tidak hadir dalam masyarakat dan terkesan asyik dengan perjuangan dan intrik untuk kepentingan elite-elitenya saja. Ini menimbulkan jarak dan persepsi negatif serta rendahnya kepercayaan dari masyarakat yang semestinya menjadi alasan utama hadirnya sebuah partai politik.⁸

Di sisi lain, dalam pelaksanaan rekrutmen politik sendiri, sering ditemukan fenomena yang dianggap sebagai kecurangan, seperti adanya hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, atau kepentingan pribadi sehingga seseorang mudah menjadi pengurus partai. Tidak jarang pula demi kepentingannya, kader suatu partai pindah ke partai lain. Fenomena tersebut sering disebut juga dengan “dinasti politik.”⁹

Persoalan di atas merupakan permasalahan yang menarik bagi penyusun untuk diketahui dan dicermati khususnya proses rekrutmen anggota dan calon anggota legislatif oleh partai politik di Kota Yogyakarta. Untuk itu penyusun akan mengambil sampel partai politik yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini, partai politik tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Alasan penyusun mengambil sampel partai politik tersebut yakni berdasarkan

⁸ Djayadi Hanan, "Parpol dan Persepsi Publik", <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/11/15150041/Parpol.dan.Persepsi.Publik.>, akses 24 Januari 2019.

⁹ Yohan Wahyu, “Dinasti Politik Menghambat Sirkulasi Elite” <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/18/11241114/Dinasti.Politik.Men>, akses 24 Januari 2019.

periodisasi terbentuknya partai politik. Pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mewakili salah satu partai besar yang berdiri sejak lama yaitu saat masih pemerintahan orde baru, PDIP berdiri pada tanggal 10 Januari 1973, merupakan fusi (penggabungan) dari beberapa partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.¹⁰ Kedua, partai politik yang dibentuk pasca reformasi sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan dan diketuai oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto. Partai Gerindra berdiri pada tanggal 6 Februari 2008. Pengurus dan aktivis partai ini dicirikan dengan pakaian safari lengan pendek dan panjang, serta kopiah hitam. Inspirasi nama Gerindra berasal dari nama partai lama, Perindra, yang merupakan pemberian langsung dari Presiden Soekarno.¹¹ Dan ketiga, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo, pengusaha yang bergerak dalam bidang media. Perindo sendiri di deklarasikan pada 7 Februari 2015 di Jakarta International Expo, Kemayoran. Partai ini tergolong baru dan akan ikut dalam Pemilu 2019.¹²

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia, akses 24 Januari 2019.

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Gerakan_Indonesia_Raya, akses 24 Januari 2019.

¹² <https://www.idntimes.com/news/indonesia/imansuryanto/ini-sejarah-berdirinya-12-partai-politik-yang-lolos-verifikasi-1/full>, akses 24 Januari 2019.

Terlebih lagi modal utama yang dimiliki masing-masing partai tersebut seperti figur-figur yang dimiliki. PDIP misalnya, partai politik yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri yang dipercaya sebagian masyarakat sebagai titisan dari pendiri bangsa ini, yaitu Bung Karno. Masyarakat beranggapan bahwa Megawati mewarisi pemikiran, ide-ide, gagasan bahkan kharisma dari sang ayah. Tak khayal jika anggotanya banyak yang menaruh simpati dan hormat terhadap Megawati Soekarnoputri.

Kemudian ada Partai Gerindra, salah satu diantara banyak partai yang mampu mengembangkan sayapnya. Sebagian besar alasan untuk bergabung ke Partai Gerindra adalah daya tarik Prabowo. Sosok Prabowo Subianto menjadi populer di kalangan masyarakat. Latar belakang Prabowo yang berasal dari militer dinilai mampu memberikan dampak yang positif terhadap kepentingan rakyat, melalui pelaksanaan program 20 aksi (peningkatan taraf hidup masyarakat, pertanian, kesehatan, cinta terhadap produk-produk dalam negeri, dan seterusnya), melaksanakan kegiatan Revolusi Putih (program minum susu), dan juga sosialisasi masalah politik kepada masyarakat agar masyarakat sadar politik.

Demikian juga Partai Perindo yang sejak awal terlihat menonjolkan sosok Hary Tanoesoedibjo selaku ketua umum sekaligus pendiri partai dan juga pengusaha media yang sudah berpetualang lama di dunia politik. Secara popularitas pun partai ini bisa jadi lebih unggul dibandingkan partai baru lainnya, mengingat pemanfaatan jaringan media yang tersebar luas dan berupaya mengenalkan diri jauh-jauh hari di berbagai lapisan masyarakat untuk mempopulerkan gagasan dan visinya.

Selain alasan-alasan tersebut, alasan lain menggunakan sampel partai-partai tersebut yaitu untuk mengetahui perbedaan praktek rekrutmen anggota dan calon anggota legislatif setiap partai politik di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik atau belum. Sehingga tulisan ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana proses perekrutan yang dilakukan oleh partai politik di Kota Yogyakarta. Selanjutnya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia.

Rekrutmen politik yang dimaksud adalah rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai politik peserta Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta, yaitu rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik, serta rekrutmen untuk menjadi calon wakil rakyat sebagai anggota legislatif (calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Mekanisme Rekrutmen Anggota dan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik (Studi Terhadap PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme rekrutmen anggota dan rekrutmen calon anggota legislatif oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta?
2. Indikator apa yang dipakai oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo dalam melakukan rekrutmen tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan objektif
 - a. Untuk mengetahui mekanisme serta indikator dalam pelaksanaan rekrutmen anggota dan rekrutmen calon anggota legislatif oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui sistem pengkaderan oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta.

2. Tujuan subjektif

Penelitian ini bertujuan sebagai syarat penyusunan untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi ilmu hukum tata negara, khususnya pemahaman mengenai peran dan fungsi partai politik.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan bahan evaluasi serta proyeksi untuk partai politik khususnya dalam mempersiapkan rekrutmen politik dan pengkaderan anggota.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan rekrutmen politik. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai rekrutmen politik diantaranya adalah sebagai berikut.

Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Muhamad berjudul “Rekrutmen Kepala Daerah Kota Yogyakarta (Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Rekrutmen Kepala Daerah Oleh Partai Golkar Tahun 2017).”¹³ Skripsi ini membahas tentang mekanisme rekrutmen politik Kepala Daerah Kota Yogyakarta dari Partai Golkar dalam pemilihan umum kepala daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2017. Dalam rekrutmen tersebut dilaksanakan secara demokratis dengan mengedepankan prinsip kedaulatan anggota, transparansi dan partisipasi setiap komponen yang ada di Partai Golkar, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimana dalam pasal tersebut menegaskan bahwa rekrutmen politik kepala daerah oleh partai politik harus dilakukan secara demokratis sesuai aturan hukum yang berlaku dan AD/ART partai. Penelitian ini termasuk ke dalam normatif-empiris, yaitu sumber data diambil dari perundang-

¹³ Fahmi Muhamad, “Rekrutmen Kepala Daerah Kota Yogyakarta (Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Rekrutmen Kepala Daerah Oleh Partai Golkar Tahun 2017)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

undangan, AD/ART Partai Golkar, buku-buku dan tulisan-tulisan. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang mencoba memaparkan mekanisme rekrutmen kepala daerah dari Partai Golkar dengan meneliti data-data yang telah terkumpul.

Skripsi yang ditulis oleh Wakhidatul Afifa berjudul “Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Semarang.”¹⁴ Skripsi ini membahas tentang implementasi rekrutmen politik pada PDI Perjuangan Kabupaten Semarang mencakup rekrutmen anggota, rekrutmen pengurus, rekrutmen calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekrutmen anggota dilakukan dengan cara persuasif yang diawali dengan sosialisasi PDI Perjuangan kepada masyarakat untuk menampilkan eksistensi partai. Kemudian rekrutmen pengurus DPC dilakukan melalui Konfercab setiap lima tahun sekali. Selanjutnya Implementasi rekrutmen calon bupati dan/atau calon wakil bupati dilakukan melalui tahap penjaringan, tahap penyaringan tahap I (satu) dan tahap II (dua) yang diatur dalam SK No 031/KPTS/DPP/X/2009. Dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tersebut bahwa implementasi rekrutmen politik pada PDI Perjuangan Kabupaten Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, hanya saja kaderisasi untuk mencetak SDM yang berkualitas perlu dioptimalkan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif supaya penelitian ini dapat dideskripsikan secara mendalam dan luas

¹⁴ Wakhidatul Afifa, “Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Semarang”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.

berdasarkan pengalaman peneliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah wakil kepala bidang organisasi, keanggotaan, kaderisasi dan rekrutmen, serta anggota atau kader PDI Perjuangan yang dipilih secara acak oleh peneliti.

Tesis yang ditulis oleh Syukur berjudul “Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Menuju Pemilu 2014 Di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.”¹⁵ Tesis ini membahas tentang proses rekrutmen politik di Kabupaten Merangin oleh partai politik peserta Pemilu 2014. Partai yang dijadikan sampel untuk mewakili dalam penelitian tesis ini adalah PDIP, PAN, PKS dan Partai Nasdem. Salah satu alasan penulis tesis menggunakan sampel partai-partai tersebut yaitu untuk mengetahui perbedaan praktik rekrutmen politik setiap partai di Kabupaten Merangin. Karena menurut isu dan pengamatan yang penulis tesis paparkan dalam latar belakang masalahnya, bahwa praktik rekrutmen politik yang dilakukan partai politik di Kabupaten Merangin masih belum berjalan dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa rekrutmen politik masih diserahkan kepada aturan internal partai, tidak ada aturan atau kriteria khusus yang diwajibkan dalam undang-undang tersebut. Partai juga cenderung mengajukan bakal caleg yang sesuai dengan kepentingan partai untuk dapat mengangkat popularitas partai, bisa dengan mengorbitkan salah satu tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Di dalam penulisan tesis tersebut juga dipaparkan mengenai indikator yang dipakai oleh

¹⁵ Syukur, “Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Menuju Pemilu 2014 Di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.

partai politik dalam rekrutmen politik di Kabupaten Merangin yang sudah diatur dalam AD/ART partai. Serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam rekrutmen politik oleh partai politik di Kabupaten Merangin, secara keseluruhan yang menjadi kendala semua partai adalah masih kurangnya pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Merangin. Pada penelitian ini penulis tesis menggunakan jenis penelitian yakni penelitian hukum empiris. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan. Dalam melakukan penelitian ini penulis tesis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada kader dan ketua partai politik yang berada di Kabupaten Merangin.

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Riyadh U.B dan Hendra Sukmana berjudul “Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo.”¹⁶ Jurnal ini membahas tentang model rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Sidoarjo. Partai politik yang dijadikan sampel untuk dalam penelitian ini adalah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model rekrutmen calon anggota legislatif partai politik di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan model

¹⁶ Ahmad Riyadh U.B dan Hendra Sukmana, “Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal, JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 3, No. 2, September 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

rekrutmen politik dari kolaborasi model rekrutmen antara lain model Barber, Snowiss, Rush & Althoff dkk. Hal tersebut dilihat dari beberapa langkah dalam rekrutmen seperti sosialisasi pendaftaran dan seleksi. Setelah itu dilakukan dengan penetapan calon anggota legislatif oleh tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai politik di Kabupaten Sidoarjo dan pemberian nomor urut sesuai dengan kriteria ketua umum partai politik dan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Selanjutnya, didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) tetap dengan nomor urutnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Dewan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo. Narasumber atau subyek penelitian ini adalah pimpinan partai politik di Kabupaten Sidoarjo, calon anggota legislatif dari partai politik di Kabupaten Sidoarjo.

Buku berjudul “Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia”¹⁷ karangan Sigit Pamungkas menyinggung mengenai rekrutmen politik yang dibahas pada Bab VI dimana dalam bab tersebut membahas tentang proses rekrutmen politik, output rekrutmen politik, dan determinan rekrutmen politik.

Penelitian mengenai rekrutmen politik merupakan kajian yang sering dilakukan, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan selalu ada saja yang diteliti berkaitan dengan rekrutmen politik. Mengenai penelitian yang sama atau sejenis ada beberapa penelitian sejenis yang digunakan penulis sebagai data pembanding seperti yang dipaparkan di atas. Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai mekanisme rekrutmen anggota baru dan rekrutmen calon

¹⁷ Sigit Pamungkas *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, cet. ke-1, hlm. 89-109.

anggota legislatif oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta. Perbedaan penelitian yang akan penulis bahas dengan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas yaitu penyusun memfokuskan pada rekrutmen anggota baru dan rekrutmen calon legislatif oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan masing-masing partai politik yang dilakukan dewan pimpinan PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, dibutuhkan suatu teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah pokok permasalahan tersebut. Teori sangat diperlukan dalam setiap penyusunan penelitan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang menundukkan masalah penelitian dan suatu teoritis yang relevan atau mampu menjawab suatu masalah.¹⁸ Sejalan dengan hal itu penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan dengan penelitian yaitu:

1. Teori Demokrasi

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 122.

Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga-lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu. Dalam bingkai teori politik, demokrasi lebih menekankan pada unsur masyarakat sebagai sebuah variabel.¹⁹

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).²⁰

Meskipun oleh Aristoteles demokrasi dinilai sebagai sistem pemerintahan dan politik yang paling buruk (*bad government*) dan mudah tergelincir menjadi *mobokrasi* (*government by mass/mob*) atau anarkis, namun tidak ada suatu negara yang ingin disebut tidak demokratis atau bukan negara demokrasi, kendati pun barangkali demokrasinya diberi tambahan label yang beraneka, misal demokrasi

¹⁹ HM. Thalhah, "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen", *Jurnal*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009.

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, hlm. 105.

rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi proletar, demokrasi Pancasila, dan sebagainya, juga mungkin hakikat demokrasi dan mekanisme demokrasinya berbeda. Suatu negara memilih sistem pemerintahan atau sistem politik demokrasi didasarkan atas pertimbangan:²¹

- a. Demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokratis yang kejam dan licik.
- b. Demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi warga negara yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
- c. Demokrasi lebih menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas.
- d. Demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka.
- e. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri hidup di bawah hukum pilihannya.
- f. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral, termasuk akuntabilitas penguasa kepada rakyat.
- g. Demokrasi membantu perkembangan manusia secara lebih total.
- h. Demokrasi membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
- i. Demokrasi modern tidak membawa peperangan negara penganutnya.

²¹ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 29.

- j. Demokrasi cenderung lebih membawa kemakmuran bagi negara penganutnya daripada pemerintahan yang tidak menganut demokrasi.

2. Teori Infrastruktur Politik

Dalam negara demokrasi, hubungan antara negara dan rakyat harus merupakan cerminan simbiosis mutualistik, artinya hubungan tersebut harus saling bergantung dan saling menguntungkan. Hubungan akan nampak jelas ketika sistem politik yang dikembangkan negara memberi ruang gerak yang cukup bagi aktivitas politik masyarakat. Sistem politik tersebut salah satunya terdiri dari infrastruktur politik. Seringkali infrastruktur politik disebut sebagai bangunan bawah, atau mesin politik informal atau mesin politik masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya.

Infrastruktur politik merupakan suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dimana dalam kegiatannya dapat memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Di dalam infrastruktur politik terdapat beberapa komponen didalamnya antara lain adalah partai politik.

Kemudian ada beberapa definisi partai politik yang diberikan para ilmuwan politik. Carl Friedrich misalnya, memberikan batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin

partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.²²

Dalam bukunya *Ecnomie et Societie*, Max Weber memberikan definisi tentang partai politik, menurutnya partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.²³

Sedangkan partai politik menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu menurut Miriam Budiardjo, partai politik memiliki fungsi sebagai berikut.

a. Partai Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Partai politik berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas kebawah dan

²² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 148.

²³ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 66.

dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan itu sangat penting karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

b. Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang dilalui seseorang untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

c. Partai Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang berkualitas, partai mempunyai kesempatan lebih besar untuk berkembang. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit untuk menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

d. Partai Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahannya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut

orang-orang untuk diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif.

3. Teori Rekrutmen Politik

Salah satu fungsi dari partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Dimana rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.²⁴

Sigit Pamungkas dalam buku berjudul “Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia” menjelaskan pentingnya rekrutmen politik dimana rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai di ruang publik. Siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalamannya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai di ruang publik. Wajah partai di ruang publik sangat tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik.²⁵

²⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hlm. 150.

²⁵ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, cet. ke-1, hlm. 90.

Selanjutnya Rush dan Althof menjelaskan bahwa rekrutmen ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal dan tidak formal. Dikatakan sebagai proses dua arah karena individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan atau mungkin didekati oleh orang lain, untuk kemudian bisa menjabat posisi-posisi tertentu. Rekrutmen disebut formal, jika para individu direkrut dengan terbuka melalui cara institusional berupa seleksi atau pemilihan. Disebut sebagai informal apabila para individu direkrut secara sendirian tanpa melalui cara institusional.²⁶ Menurut Czudnowski mekanisme rekrutmen politik antara lain:²⁷

a. Rekrutmen terbuka

Di mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka yaitu:

1) Mekanismenya demokratis

²⁶ Sugeng, "Rekrutmen Politik Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Pekanbaru Tahun 2014", *Jurnal, JOM FISIP* Vol. 2 No. 2 – Oktober 2015, Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

²⁷ Fadillah Putra, *Partai Politik & Kebijakan Publik*, cet. ke-2, hlm. 259.

- 2) Tingkat kompetensi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
- 3) Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
- 4) Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

b. Rekrutmen tertutup

Dalam rekrutmen tertutup syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan metode penelitian agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah, sehingga menghasilkan data yang maksimal, akurat dan dapat di pertanggungjawabkan. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjelaskan mekanisme rekrutmen politik oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta yaitu rekrutmen anggota dan rekrutmen calon anggota legislatif. Semua

data penelitian dikumpulkan dari penggalan data yang bersumber dari lapangan yang kemudian dilakukan analisis. Adapun pihak-pihak terkait yang terlibat dalam wawancara adalah fungsionaris dari dewan pimpinan PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pelaksanaan ketentuan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh dari lapangan.

3. Sumber Data

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya.²⁸ Penelitian ini menggunakan data hukum primer dan data sekunder, yakni:

a. Data Primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun yakni mengambil data yang diperoleh dari metode observasi di lapangan serta melakukan

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Semua bahan hukum yang diambil dari sumber-sumber tertentu kemudian digunakan untuk mendukung data primer, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan AD/ART Partai Politik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yang bersumber dari buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah dan hasil karya ilmiah para sarjana, kamus hukum, jurnal hukum, literatur dan hasil penelitian lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Yogyakarta dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah. Penyusun menggunakan dan mencoba menggali informasi dan data yang ingin didapatkan dengan memberikan beberapa poin pertanyaan mengenai beberapa hal yang terkait dengan rekrutmen politik kepada fungsionaris dari dewan pimpinan PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa informan sebagai berikut.

- 1) Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Yogyakarta yaitu Sutaryo
- 2) Kepala Kantor Kesekretariatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Yogyakarta yaitu Made Dwi Putra
- 3) Bendahara Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Yogyakarta Ibu Ririk Banowati Permanasari
- 4) Kepala Kantor Kesekretariatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Yogyakarta yaitu Eko Noprianto
- 5) Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Yogyakarta yaitu Wigit Adi Sasoko
- 6) Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Yogyakarta yaitu Doni Bondan Wicaksono

- b. Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun. Dokumentasi bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data-data yang sudah didapatkan dari data primer.

6. Metode Analisis Data

Merupakan cara untuk mengolah data kemudian dianalisis sehingga akan menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni menggambarkan karakteristik serta fenomena atau gejala-gejala yang mempengaruhi mekanisme rekrutmen anggota dan rekrutmen calon anggota legislatif oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta kemudian dilakukan analisa mendalam terhadap hal tersebut. Metode analisis yang penyusun gunakan adalah metode kualitatif yaitu mencoba menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis dimana penyusun harus dapat menentukan data dan bahan hukum mana yang digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang esensi dalam penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penyusun dalam penyajian skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut.

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

Bab *kedua*, dalam pembahasan bab kedua ini, penyusun akan menyajikan tinjauan umum tentang demokrasi, partai politik, dan rekrutmen politik.

Bab *ketiga*, dalam pembahasan bab ketiga ini, penyusun akan menguraikan gambaran umum mengenai partai politik peserta Pemilu 2019 dan pelaksanaan rekrutmen anggota dan rekrutmen calon anggota legislatif oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta.

Bab *keempat*, dalam pembahasan bab keempat ini, penyusun akan menyajikan analisis dari data yang telah diperoleh serta pembahasan yang lebih lanjut, terutama mengenai mekanisme rekrutmen anggota dan rekrutmen calon anggota legislatif oleh PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta serta indikator yang dipakai dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut.

Bab *kelima*, yaitu sebagai bab penutup memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Serta memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan khazanah keilmuan baru dalam bidang hukum tata negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Mekanisme rekrutmen anggota oleh dewan pimpinan PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta dilakukan menggunakan mekanisme rekrutmen terbuka. Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk dapat perlakuan yang sama, termasuk turut serta dalam proses politik dengan bergabung dengan partai politik. Dalam melakukan rekrutmen anggota baru, dewan pimpinan PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut menjadi bagian anggota dari partai. Sementara dewan pimpinan PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif memiliki mekanisme dan ketentuan masing-masing. Dalam proses rekrutmen tersebut ada yang menggunakan mekanisme terbuka dan ada juga yang menggunakan metode tertutup. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Yogyakarta lebih cenderung menggunakan sistem tertutup yang bakal calegnya diambil dari kader internal yang dinilai memiliki potensi. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Yogyakarta cenderung menggunakan sistem rekrutmen terbuka yaitu dengan cara membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bergabung

dan berjuang bersama partai bahkan mampu mengakomodir caleg penyandang disabilitas. Sedangkan Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Yogyakarta menggunakan sistem yang lebih terbuka, dengan mengandalkan peran media yang dimilikinya dan juga mengedepankan komposisi caleg eksternal yang lebih banyak ketimbang caleg internalnya.

2. Indikator rekrutmen anggota dan calon anggota legislatif yang digunakan oleh masing-masing dewan pimpinan partai politik di Kota Yogyakarta sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dalam AD/ART dan peraturan partai. Dewan pimpinan partai politik di Kota Yogyakarta dalam hal rekrutmen anggota hampir semuanya memiliki kesamaan, yaitu masyarakat yang telah memenuhi usia 17 tahun dan memiliki KTP. Sedangkan untuk rekrutmen calon legislatif, Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Yogyakarta merekrut bakal caleg yang diambil dari anggota yang memiliki loyalitas tinggi terhadap partai serta ketokohnya di masyarakat dan tentunya juga berkualitas untuk bisa menduduki jabatan elite politik nantinya, ini diperkuat dengan banyaknya anggota yang dimiliki dan tidak mengambil orang-orang dari luar. Untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Yogyakarta dalam proses rekrutmen tidak menggunakan indikator yang terlalu ketat karena merekrut calon legislatif baik anggota maupun non-anggota asalkan memang memiliki kapabilitas. Dan terakhir, Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Yogyakarta dalam proses perekrutan menggunakan indikator yang lebih terbuka yaitu memberikan kesempatan kepada orang luar yang tertarik untuk

menjadi caleg dengan kendaraan partai Perindo, hal ini dibuktikan dengan calon legislatif yang terdaftar hanya 40% dari internal Partai Perindo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Untuk dewan pimpinan PDIP, Partai Gerindra dan Partai Perindo di Kota Yogyakarta agar meningkatkan kualitas proses rekrutmen baik dalam melakukan perekrutan calon anggota partai maupun calon anggota legislatif dengan menyesuaikan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan aturan masing-masing partai, sehingga nantinya dihasilkan anggota partai dan calon legislatif yang berkualitas sesuai dengan visi misi dan ideologi masing-masing partai serta sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat karena anggota partai dan calon legislatif merupakan generasi pemimpin bangsa nantinya dan wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi di pemerintahan.
2. Kedepan setiap partai politik agar lebih menekankan pelaksanaan rekrutmen pada proses dan aturan yang ideal. Misalnya kriteria bakal calon anggota legislatif harus dimunculkan dalam AD/ART partai secara lebih terperinci bukan hanya sekedar mengatur tentang keanggotaan saja, dan juga rekrutmen politik yang dilakukan tidak hanya menjelang Pemilu saja, tetapi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan jauh-jauh hari sebelum Pemilu dilaksanakan. Misalnya dengan melakukan program pendidikan politik kepada masyarakat,

hal ini dapat memperoleh simpati masyarakat maupun menarik minat masyarakat terhadap politik serta dapat menambah pengetahuan politik kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

AD/ART Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

AD/ART Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

B. Buku

Afifa, Wakhidatul, "Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Semarang", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fadjar, Abdul Mukthie, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press, 2013.

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Gatara, Sahid dan Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Haris, Syamsudin, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, Jakarta: Gramedia, 2005.

Jurdi, Fatahullah, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Muhamad, Fahmi, "Rekrutmen Kepala Daerah Kota Yogyakarta (Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Rekrutmen Kepala Daerah Oleh Partai Golkar Tahun 2017)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Pamungkas, Sigit, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011.

Putra, Fadillah, *Partai Politik & Kebijakan Publik*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Syukur, "Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Menuju Pemilu 2014 Di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik", *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.

Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

C. Jurnal

Nihaya M, H., “Demokrasi Dan Problematikanya Di Indonesia”, *Jurnal*, Jurnal Sulesana Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011, Jurusan Pemikiran Islam Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar.

Hasbi, Muhammad “Wacana Demokrasi dalam Pemikiran Politik Islam”, *Jurnal*, Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 45, No. I, 2011.

Sugeng, “Rekrutmen Politik Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Pekanbaru Tahun 2014”, *Jurnal*, JOM FISIP Vol. 2 No. 2 – Oktober 2015, Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Thalhah, HM., “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”, *Jurnal*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009.

U.B., Ahmad Riyadh dan Hendra Sukmana, “Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal*, JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No. 2, September 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

D. Sumber-Sumber Lain

Djayadi Hanan, "Parpol dan Persepsi Publik", <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/11/15150041/Parpol.dan.Persepsi.Publik.>, akses 24 Januari 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia, akses 24 Januari 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Gerakan_Indonesia_Raya, akses 24 Januari 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Persatuan_Indonesia, akses 27 Mei 2019.

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/imansuryanto/ini-sejarah-berdirinya-12-partai-politik-yang-lolos-verifikasi-1/full>, akses 24 Januari 2019.

<https://kota-yogyakarta.kpu.go.id/penetapan-daftar-calon-tetap-dct-anggota-dprd-kota-yogyakarta-pemilu-tahun-2019/>, akses pada 27 Juli 2019.

<https://kpu.go.id>, akses 27 Mei 2019.

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4635061/ini-40-caleg-terpilih-dprd-kota-yogyakarta-2019-2024>, akses pada 27 Juli 2019.

<https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-partai-pdip>, akses 27 Mei 2019.

<https://www.tagar.id/caleg-artis-senjata-partai-untuk-promosi-instan>, akses 24 Januari 2019.

Yohan Wahyu, “Dinasti Politik Menghambat Sirkulasi Elite
<https://nasional.kompas.com/read/2013/03/18/11241114/Dinasti.Politik.Men>, akses 24 Januari 2019.

[www.http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra](http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra), akses 27 Mei 2019.

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-260/Un.02/DS.1/PG.00/01/2019 31 Januari 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl.Jend. Sudirman No.05 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

MEKANISME REKRUTMEN POLITIK PADA PARTAI POLITIK DI TINGKAT DPC KOTA YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Kholil Hasyim Nur Mahmud
NIM : 15340093
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VIII
Alamat Asal : Gunung Gebang RT 01/RW 18, Sumberharjo, Prambanan,
Sleman, D.I. Yogyakarta 55572
Alamat di Yogyakarta : Gunung Gebang RT 01/RW 18, Sumberharjo, Prambanan,
Sleman, D.I. Yogyakarta 55572

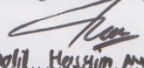
Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. KPU Kota Yogyakarta
2. Kantor Partai Politik di Tingkat DPC Kota Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Observasi dan Wawancara
Adapun waktunya mulai tanggal 4 Februari 2019 s/d 4 Maret 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(...Kholil... Hasyim Nur Mahmud...)

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)

a.n. Dekan,
a.n. Dekan Bidang Akademik

Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 1 Februari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1216/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-268/Un.02/DS.1/PG.00/01/2019
Tanggal : 31 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"MEKANISME REKRUTMEN POLITIK PADA PARTAI POLITIK DI TINGKAT DPC KOTA YOGYAKARTA (STUDI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019)"** kepada:

Nama : KHOLIL HASYIM NUR MAHMUD
NIM : 15340093
No.HP/Identitas : 081228141693/3404091970001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - KPU Kota Yogyakarta
- Kantor Partai Politik di Tingkat DPC Kota Yogyakarta

Waktu Penelitian : 4 Februari 2019 s.d 4 Maret 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/ Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19661026 198203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 0320/34/UH/II/2019

Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/1216/Kesbangpol/2019 Tanggal : 01 Februari 2019

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : KHOLIL HASYIM NUR MAHMUD
No. Mhs/ NIM : 15340093
Pekerjaan : Mahasiswa Ilmu Hukum Fak. Syarifah Dan Hukum UIN Suka Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Nurainun Mangunsong S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian Dengan Judul Proposal : MEKANISME REKRUTMEN POLITIK PADA PARTAI POLITIK DI TINGKAT DPC KOTA YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 08 Februari 2019 s/d 08 Mei 2019
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 08 Februari 2019

An Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

DPC Hristy Dewyaningrum
NIP. 19930408199302019

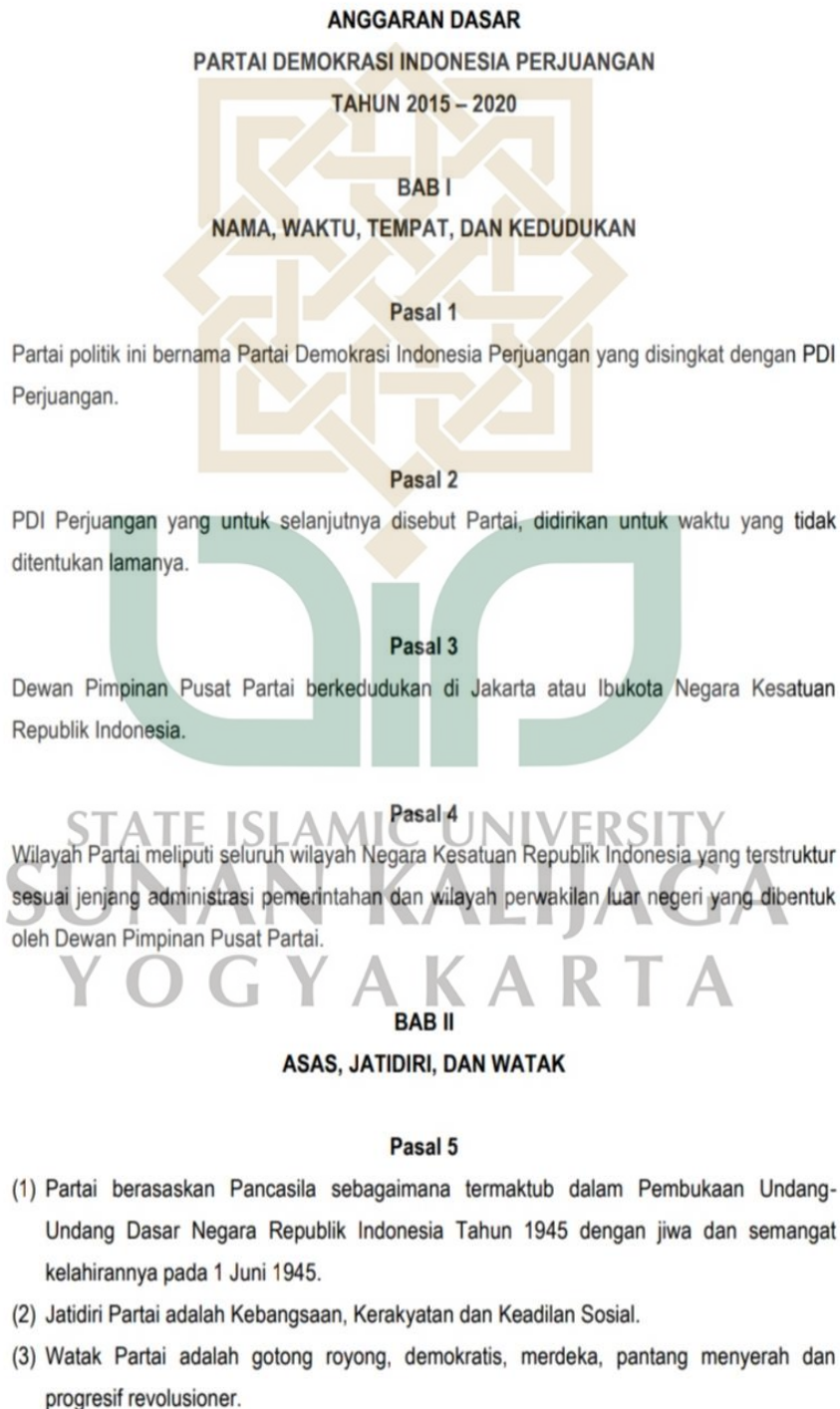
Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
4. Ketua DPD Partai Perindo Kota Yogyakarta
5. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta
6. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Yogyakarta
7. Ybs.

Lampiran 2

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP)

Sumber: laman situs www.pdiperjuangan.id



ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
TAHUN 2015 – 2020

BAB I
KEANGGOTAAN

Bagian Pertama
Syarat Keanggotaan

Pasal 1
Anggota Biasa Partai

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia dapat mendaftarkan diri menjadi Anggota Biasa Partai.
- (2) Syarat untuk menjadi anggota biasa Partai:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - b. bersedia mematuhi Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan aturan-aturan partai lainnya;
 - c. bersedia mematuhi dan menegakkan Disiplin Partai;
 - d. bersedia mengikuti kegiatan Partai sesuai instruksi Partai;
 - e. bersedia menyatakan diri secara tertulis sebagai Anggota Biasa, dan menyampaikannya kepada Dewan Pimpinan Partai atau melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP Partai; dan
 - f. bersedia memenuhi persyaratan administrasi persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Partai.

Pasal 2
Anggota Partai

- (1) Setiap Anggota Biasa Partai wajib mengikuti pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan Partai di wilayahnya.
- (2) Selama masa pelatihan, pendidikan dan pembinaan, Partai memberikan materi ideologi Partai dan pendidikan politik dasar kepada Anggota Biasa berdasarkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Partai.

Lampiran 3

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Sumber: laman situs www.partaigerindra.or.id

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH

Pasal 1

Nama

Partai ini bernama Partai Gerakan Indonesia Raya, disingkat Partai GERINDRA.

Pasal 2

Waktu

Partai GERINDRA didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Kedudukan

Dewan Pembina (DP) Partai dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Wilayah

Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang administrasi pemerintahan.

BAB II

AZAS, BENTUK, JATI DIRI DAN WATAK

Pasal 5

Azas

Partai GERINDRA berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6

Bentuk

Partai GERINDRA adalah Partai Rakyat berbasis Kader.

Pasal 7

Jati diri

Jati Diri Partai GERINDRA adalah kebangsaan, kerakyatan, religius dan keadilan sosial.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA
TAHUN 2014**

**BAB I
KEANGGOTAAN DAN KADER
Pasal 1
Syarat Keanggotaan**

Syarat menjadi Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) adalah :

- (1) Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
- (3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai.
- (4) Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.

**Pasal 2
Kewajiban Anggota**

Setiap Anggota Partai GERINDRA berkewajiban :

- (1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai.
- (3) Mengamalkan dan memperjuangkan kebijakan Partai.
- (4) Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai.
- (5) Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai.
- (6) Membayar iuran Anggota.

**Pasal 3
Hak Anggota**

Setiap Anggota Partai GERINDRA berhak :

- (1) Memperoleh perlakuan yang sama.
- (2) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
- (3) Memilih dan dipilih.

Lampiran 4

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Sumber: laman situs www.partaiperindo.com

Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo |

BAB I NAMA, PENDIRIAN, ASAS, KEDUDUKAN DAN LAMBANG ORGANISASI

Pasal 1 Nama dan Pendirian

Partai ini bernama Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) yang merupakan perubahan nama dari Partai Indonesia Sejahtera disingkat PIS yang selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Partai. Didirikan pada tanggal 17 Agustus 2006.

Pasal 2 Azas

Partai PERINDO berasaskan Pancasila.

Pasal 3 Kedudukan

Kantor pusat Partai PERINDO berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 4 Visi

Mewujudkan Indonesia yang berkembang, bersatu, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya.

Pasal 5 Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum sesuai dengan UUD 1945.
2. Mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk Indonesia yang mandiri dan bermartabat.
3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bermartabat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI
4. Menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Menegakan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara.
6. Mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan warga negara Indonesia.

1.2. Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI PERINDO

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Setiap warga negara Republik Indonesia :
 - a. Telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
2. Setiap warga negara yang telah memenuhi ayat 1 dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan.
3. Setiap Warga Negara Indonesia yang telah disetujui menjadi anggota partai akan diberikan kartu anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui struktur resmi partai di tempat yang bersangkutan melakukan pendaftaran.

Pasal 2 Kewajiban Anggota

1. Patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan Partai.
2. Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip partai.
3. Membayar iuran wajib anggota.
4. Tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.

Pasal 3 Hak-hak anggota

1. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota partai lainnya.
2. Mempunyai hak memilih dan dipilih.
3. Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat.
4. Mempunyai hak untuk membela diri.

Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Daerah Pemilihan (Dapil) 1: Meliputi Wilayah Kecamatan Mergangsari, Mantriweron, dan Kraton

Sumber: laman situs www.kota-yogyakarta.kpu.go.id

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA : YOGYAKARTA PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAERAH PEMILIHAN : KOTA YOGYAKARTA 1 (MELIPUTI WILAYAH KECAMATAN MERGANGSARI, MANTRIWERON & KRATON)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.
4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.
6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.
7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.
8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.
9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.
10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.
11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.
12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.
13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.
14.	14.	14.	14.	14.	14.	14.	14.	14.	14.	14.	14.	14.	14.	14.	14.	14.	14.	14.	14.
15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.
16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.
17.	17.	17.	17.	17.	17.	17.	17.	17.	17.	17.	17.	17.	17.	17.	17.	17.	17.	17.	17.
18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.
19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.
20.	20.	20.	20.	20.	20.	20.	20.	20.	20.	20.	20.	20.	20.	20.	20.	20.	20.	20.	20.

PENUNJUK KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DALAM DAFTAR CALON TETAP

No Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Partai Politik
1	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
2	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
3	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
4	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
5	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
6	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
7	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
8	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
9	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
10	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
11	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
12	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
13	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
14	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
15	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
16	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
17	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
18	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
19	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS
20	Putri Nurul Huda, S.Pd	P	28	S1	Wiraswasta	Klaten	PKS

Daftar Calon Tetap

Pada tanggal 20 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

1. Ketua : Wawan Sudjanto, S.Ag, M.S.

2. Anggota : Sri Suroto, SP

3. Anggota : Hidayat Wicaksono, S.P

4. Anggota : Siti Nurhasanah, S.S.

5. Anggota : R. M. N. Ario Murad, SE

Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Daerah Pemilihan (Dapil) 2: Meliputi Wilayah Kecamatan Pakualaman,
Gondomanan, Ngampilan dan Wirobrajan





MODEL DCT

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOTA : YOGYAKARTA
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAERAH PEMILIHAN : KOTA YOGYAKARTA 2
(MELIPUTI WILAYAH KECAMATAN PAKUALAMAN, GONDOMANAN, NGAMPILAN & WIROBRAJAN)

1	2	3	4	5	6	7	8

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DALAM DAFTAR CALON TETAP
DAERAH PEMILIHAN KOTA YOGYAKARTA 2

NO	NAMA PARTAI	LEBIH DARI 30% PEREMPUAN	AKHIR	PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	3	100%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERAKAN)	3	3	100%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	3	3	100%
4	Partai Gerakan Keras (GK)	3	3	100%
5	Partai Nasional (NASIONAL)	3	3	100%
6	Partai Gerakan Pemulihan Indonesia (GAPRI)	3	3	100%
7	Partai Berkarya (PBK)	3	3	100%
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	3	100%
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	3	100%
10	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	3	100%
11	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	3	100%
12	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERAKAN)	3	3	100%
13	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	3	3	100%
14	Partai Gerakan Keras (GK)	3	3	100%
15	Partai Nasional (NASIONAL)	3	3	100%
16	Partai Gerakan Pemulihan Indonesia (GAPRI)	3	3	100%
17	Partai Berkarya (PBK)	3	3	100%
18	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	3	100%
19	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	3	100%
20	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	3	100%



Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 September 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

- Ketua : Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.
- Anggota : Sri Sunari, SP.
- Anggota : Hidayat Wicaksono, S.P.
- Anggota : Sri Nurhayati, S.S.
- Anggota : R. M. N. Ans Murandaz, SE.





Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Daerah Pemilihan (Dapil) 3: Meliputi Wilayah Kecamatan Jetis, Gondongtengen,
dan Tegalrejo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



1. Ketua : Wawan Budiyanto, S.Ag., M.
2. Anggota : Sri Surani, SP.
3. Anggota : Hidayat Widodo, S.IP.
4. Anggota : Siti Nurhayati, S.S.
5. Anggota : R. M. N. Aris Munandar, SE.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Daerah Pemilihan (Dapil) 4: Meliputi Wilayah Kecamatan Danurejan dan
Gondokusuman

MODE



DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 KOTA : YOGYAKARTA
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 DAERAH PILIHAN : KOTA YOGYAKARTA 4
 (MELIPUTI WILAYAH KECAMATAN DANUREJAN & GONDOKUSUMAN)

1 PARTAI KEMERDEKAAN BANGSA (PKB)		2 PARTAI GERAKAN INDONESIA SEKELUAR (GISE)		3 PARTAI GERAKAN MASYARAKAT (GERAM)		4 PARTAI HIMPUNAN KEMAJUAN BAKTI (HKBI)		5 PARTAI HIMPUNAN KEMAJUAN BAKTI (HKBI)		6 PARTAI HIMPUNAN KEMAJUAN BAKTI (HKBI)		7 PARTAI HIMPUNAN KEMAJUAN BAKTI (HKBI)		8 PARTAI HIMPUNAN KEMAJUAN BAKTI (HKBI)	
1		1		1		1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5		5		5		5	
6		6		6		6		6		6		6		6	

9 PARTAI GERAKAN MASYARAKAT (GERAM)		10 PARTAI GERAKAN MASYARAKAT (GERAM)		11 PARTAI GERAKAN MASYARAKAT (GERAM)		12 PARTAI GERAKAN MASYARAKAT (GERAM)		13 PARTAI GERAKAN MASYARAKAT (GERAM)		14 PARTAI GERAKAN MASYARAKAT (GERAM)		19 PARTAI GERAKAN MASYARAKAT (GERAM)		20 PARTAI GERAKAN MASYARAKAT (GERAM)	
1		1		1		1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5		5		5		5	
6		6		6		6		6		6		6		6	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DALAM DAFTAR CALON TETAP

NO	DAFTAR CALON TETAP	LEBIH DARI 30% PEREMPUAN	DAFTAR CALON TETAP	PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	30%	30%	Mematuhi
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINIA)	30%	30%	Mematuhi
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	30%	30%	Mematuhi
4	Partai Gerakan Karya (GAKAR)	30%	30%	Mematuhi
5	Partai Nasional Indonesia (PNI)	30%	30%	Mematuhi
6	Partai Gerakan Pembaruan Indonesia (GAPRI)	30%	30%	Mematuhi
7	Partai Berkarya Indonesia (PBI)	30%	30%	Mematuhi
8	Partai Gerakan Pemuda (GP)	30%	30%	Mematuhi
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	30%	30%	Mematuhi
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	30%	30%	Mematuhi
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	30%	30%	Mematuhi
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	30%	30%	Mematuhi
13	Partai Mufti Mawar Rakyat Indonesia (PMRI)	30%	30%	Mematuhi
14	Partai Demokrat (PDK)	30%	30%	Mematuhi
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	30%	30%	Mematuhi
16	Partai Solidaritas dan Persatuan Indonesia (SPSI)	30%	30%	Mematuhi

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 September 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

1. Ketua : Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si.
 2. Anggota : Sri Suroto, SP.
 3. Anggota : Hidayat Wicaksono, S.P.
 4. Anggota : Siti Nurhayati, S.S.
 5. Anggota : R. M. N. Anis Munandar, SE.





17 Agustus 2019
Serentak 2019
PEMILU

DPK, DPT dan DPD serta pemilih di semua TPS

Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA : YOGYAKARTA PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAERAH PEMILIHAN : KOTA YOGYAKARTA 5 (MELIPUTI WILAYAH KECAMATAN UMBULHARJO & KOTAGEDE)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
 1  1.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PKB	 2  2.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PKS	 3  3.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PDI Perjuangan	 4  4.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. Gerindra	 5  5.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. Golkar	 6  6.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PAN	 7  7.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PPP	 8  8.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PKS	 9  9.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PKB	 10  10.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PKS	 11  11.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PDI Perjuangan	 12  12.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. Gerindra	 13  13.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. Golkar	 14  14.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PAN	 15  15.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PPP	 16  16.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PKS	 17  17.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PKB	 18  18.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PKS	 19  19.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. PDI Perjuangan	 20  20.1 DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P. Gerindra



Lampiran 6

Dokumentasi Penelitian



Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta
 Alamat: Jl. Pakel Baru Utara No. 3, Sorosutan, Kota Yogyakarta



Wawancara dengan Sutaryo selaku Sekretaris DPC PDIP Kota Yogyakarta Sekaligus Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Dapil 4 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dilakukan pada Tanggal 8 Maret 2019



Wawancara dengan Made Dwi Putra Selaku Kepala Kantor Staf Kesekretariatan DPC PDIP Kota Yogyakarta, dilakukan pada Tanggal 6 Maret 2019



Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Yogyakarta
Alamat: Jl. Batikan No. 70, Pandeyan, Kota Yogyakarta



Wawancara dengan Ririk Banowati Permanasari Selaku Bendahara Umum DPC Partai Gerindra Kota Yogyakarta Sekaligus Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Dapil 4 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dilakukan pada Tanggal 13 Februari 2019



Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Yogyakarta
Alamat: Jl. Ipda Tut Harsono No. 68, Muja Muju, Kota Yogyakarta



Wawancara dengan Wigit Adi Sasoko selaku Ketua Umum DPD Partai Perindo Kota Yogyakarta, dilakukan pada Tanggal 27 Februari 2019



Wawancara dengan Doni Bondan Wicaksono selaku Sekretaris DPD Partai Perindo Kota Yogyakarta, dilakukan pada Tanggal 14 Februari 2019

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Kholil Hasyim Nur Mahmud
Nama Panggilan : Kholil
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 19 Januari 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Gunung Gebang RT 01/RW 18, Sumberharjo,
Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta 55572
No. HP/WhatsApp : 0812-2814-1693
E-mail : kholilhasyicm@gmail.com



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Masyitoh 3 Piyungan (2002-2003)
2. SDN Bleber 1 (2003-2009)
3. SMPN 1 Piyungan (2009-2012)
4. SMAN 1 Prambanan Sleman (2012-2015)
5. Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2019)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017-Sekrang)
2. LP2KIS Yogyakarta (2017-Sekrang)

D. PRESTASI

1. Juara III Lomba Cerdas Cermat Koperasi Antar Mahasiswa Tingkat Nasional
“*National Cooperative Competition*” (Tahun 2017)